



KEPALA DESA BUNISARI  
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA BUNISARI  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUNISARI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BUNISARI

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse Disease 2019 ( Covid-19) dan atau dalam rangkamenghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Viruse Diseas 2019 ( Covid-19) dan atau dalam rangkamenghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi Corona Viruse Diseas 2019 ( Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Viruse Diseas 2019 ( Covid-19) ditingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Viruse Diseas 2019 ( Covid-19);
14. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 perihal Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
17. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
18. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Corona Viruse Diseas 2019 ( Covid-19);
19. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-Desa tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Cianjur;
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor

- 79);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
  27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
  28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
  29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
  30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
  31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 2);
  32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 2);
  33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 3);
  34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 4);
  35. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/KEP.13-DPMD/2021 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tahun 2021;
  36. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
  37. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/2716/DPMD tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa di Kabupaten Cianjur;
  38. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/981/DPMD tentang Penyaluran BLT Dana Desa sampai Desember 2021;
  39. Peraturan Desa Bunisari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bunisari Tahun 2021-2026;
  40. Peraturan Desa Bunisari Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bunisari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNISARI

Dan

KEPALA DESA BUNISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUNISARI TAHUN ANGGARAN 2021

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bunisari Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 2.166.591.000,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 2.166.591.000,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | (0,00)           |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 0,00             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 0,00             |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 0,00             |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00             |

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BUNISARI.

Ditetapkan di : BUNISARI

Pada tanggal : 16 Februari 2021



Diundangkan di : BUNISARI

Pada tanggal : 16 Februari 2021

SEKRETARIS DESA BUNISARI



LEMBARAN DESA BUNISARI TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA BUNISARI  
 NOMOR 2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUNISARI  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

| KODE REK  | URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp)        | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1         | 2                                     | 3                       | 4          |
| <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.      | Pendapatan Asli Desa                  | 36.000.000,00           |            |
| 4.2.      | Pendapatan Transfer                   | 2.130.591.000,00        |            |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>2.166.591.000,00</b> |            |
| <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                       | 422.060.000,00          |            |
| 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa               | 711.831.000,00          |            |
| 5.3.      | Belanja Modal                         | 315.100.000,00          |            |
| 5.4.      | Belanja Tidak Terduga                 | 717.600.000,00          |            |
|           | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>2.166.591.000,00</b> |            |
|           | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>0,00</b>             |            |
|           | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

BUNISARI, 16 Februari 2021

H. DEDIT JUHAENI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUNISARI  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

| KODE REKENING |           | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|------------------------------|------------|
| 1             | 2         | 3  | 4                            | 5          |
|               | <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN</b>  |                              |            |
|               | 4.1.      | Pendapatan Asli Desa   | 36.000.000,00                |            |
|               | 4.2.      | Pendapatan Transfer  | 2.130.591.000,00             |            |
|               |           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   | <b>2.166.591.000,00</b>      |            |
|               | <b>5.</b> | <b>BELANJA</b>   |                              |            |
| <b>1</b>      |           | <b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>  | <b><u>882.690.000,00</u></b> |            |
| <b>1.1.</b>   |           | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b> | <b>700.910.000,00</b>        |            |
| 1.1.01        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa   | 45.960.000,00                | ADD        |
| 1.1.01        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 45.960.000,00                |            |
| 1.1.02        |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  | 307.800.000,00               | ADD        |
| 1.1.02        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 307.800.000,00               |            |
| 1.1.04        |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian         | 87.400.000,00                | ADD        |
| 1.1.04        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 87.400.000,00                |            |
| 1.1.05        |           | Penyediaan Tunjangan BPD   | 45.800.000,00                | ADD, PBP   |
| 1.1.05        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 45.800.000,00                |            |
| 1.1.06        |           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj        | 4.250.000,00                 | ADD        |
| 1.1.06        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 4.250.000,00                 |            |
| 1.1.07        |           | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  | 187.200.000,00               | ADD        |
| 1.1.07        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 187.200.000,00               |            |
| 1.1.90        |           | Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)   | 22.500.000,00                | PBP        |
| 1.1.90        | 5.1.      | Belanja Pegawai  | 22.500.000,00                |            |
| <b>1.2.</b>   |           | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>   | <b>87.500.000,00</b>         |            |
| 1.2.01        |           | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan  | 17.500.000,00                | PBP        |
| 1.2.01        | 5.3.      | Belanja Modal  | 17.500.000,00                |            |
| 1.2.02        |           | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa  | 64.600.000,00                | PBP        |
| 1.2.02        | 5.3.      | Belanja Modal  | 64.600.000,00                |            |
| 1.2.90        |           | Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga  | 5.400.000,00                 | PBP        |
| 1.2.90        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 5.400.000,00                 |            |
| <b>1.4.</b>   |           | <b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>  | <b>85.537.500,00</b>         |            |
| 1.4.01        |           | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)                                     | 7.794.500,00                 | PBH        |
| 1.4.01        | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 7.794.500,00                 |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                            | 5          |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)              | 6.716.000,00                 | PBH        |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 6.716.000,00                 |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                             | 3.403.500,00                 | PBH        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 3.403.500,00                 |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)                   | 3.603.500,00                 | PBH        |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 3.603.500,00                 |            |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                | 7.740.000,00                 | PBH        |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 7.740.000,00                 |            |
| 1.4.08        |      | Pengembangan Sistem Informasi Desa   | 56.280.000,00                | DDS        |
| 1.4.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 10.280.000,00                |            |
| 1.4.08        | 5.3. | Belanja Modal  | 46.000.000,00                |            |
| 1.5.          |      | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>   | <b>8.742.500,00</b>          |            |
| 1.5.06        |      | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  | 8.742.500,00                 | PBH        |
| 1.5.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 8.742.500,00                 |            |
| <b>2</b>      |      | <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                      | <b><u>480.616.000,00</u></b> |            |
| <b>2.1.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>   | <b>44.400.000,00</b>         |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 26.400.000,00                | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 26.400.000,00                |            |
| 2.1.03        |      | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                                    | 18.000.000,00                | DDS        |
| 2.1.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 18.000.000,00                |            |
| <b>2.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>  | <b>205.816.000,00</b>        |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                   | 15.000.000,00                | PBP        |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 15.000.000,00                |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan   | 190.816.000,00               | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 190.816.000,00               |            |
| <b>2.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>  | <b>182.400.000,00</b>        |            |
| 2.4.07        |      | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)         | 182.400.000,00               | DDS        |
| 2.4.07        | 5.3. | Belanja Modal  | 182.400.000,00               |            |
| <b>2.5.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>                                       | <b>48.000.000,00</b>         |            |
| 2.5.03        |      | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)         | 48.000.000,00                | DDS        |
| 2.5.03        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 48.000.000,00                |            |
| <b>3</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>  | <b><u>36.000.000,00</u></b>  |            |
| <b>3.2.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>   | <b>24.000.000,00</b>         |            |
| 3.2.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                 | 24.000.000,00                | PAD        |
| 3.2.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 24.000.000,00                |            |
| <b>3.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>   | <b>12.000.000,00</b>         |            |
| 3.4.99        |      | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  | 12.000.000,00                | PAD        |



| KODE REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-------------------------|------------|
| 1             | 2    | 3  | 4                       | 5          |
| 3.4.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 12.000.000,00           |            |
| <b>4</b>      |      | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>  | <b>97.685.000,00</b>    |            |
| <b>4.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                          | <b>57.500.000,00</b>    |            |
| 4.3.01        |      | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa  | 6.000.000,00            | DDS        |
| 4.3.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 6.000.000,00            |            |
| 4.3.02        |      | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa   | 25.400.000,00           | DDS        |
| 4.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 25.400.000,00           |            |
| 4.3.03        |      | Peningkatan Kapasitas BPD  | 15.550.000,00           | DDS        |
| 4.3.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 10.950.000,00           |            |
| 4.3.03        | 5.3. | Belanja Modal  | 4.600.000,00            |            |
| 4.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa              | 10.550.000,00           | DDS        |
| 4.3.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 10.550.000,00           |            |
| <b>4.4.</b>   |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>       | <b>25.280.000,00</b>    |            |
| 4.4.01        |      | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                                | 25.280.000,00           | DDS        |
| 4.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 25.280.000,00           |            |
| <b>4.5.</b>   |      | <b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>              | <b>5.429.500,00</b>     |            |
| 4.5.01        |      | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM  | 5.429.500,00            | DDS        |
| 4.5.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.429.500,00            |            |
| <b>4.6.</b>   |      | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>                                     | <b>4.697.500,00</b>     |            |
| 4.6.02        |      | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)         | 4.697.500,00            | DDS        |
| 4.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 4.697.500,00            |            |
| <b>4.7.</b>   |      | <b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>                                | <b>4.778.000,00</b>     |            |
| 4.7.04        |      | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 4.778.000,00            | DDS        |
| 4.7.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 4.778.000,00            |            |
| <b>5</b>      |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>                | <b>669.600.000,00</b>   |            |
| <b>5.3.</b>   |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>   | <b>669.600.000,00</b>   |            |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak  | 669.600.000,00          | DDS        |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga  | 669.600.000,00          |            |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>  | <b>2.166.591.000,00</b> |            |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>   | <b>0,00</b>             |            |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>  | <b>0,00</b>             |            |

